

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Arus perubahan dalam politik global telah menjadikan isu internasional semakin kompleks. Pemahaman keadaan politik dan kemampuan merespon secara tepat isu-isu yang ada sekarang maupun di masa akan datang, sangat diperlukan oleh negara dalam implementasi kebijakan luar negerinya, tidak terkecuali Indonesia. Karakteristik dan dimensi hubungan antar negara yang juga menjadi rumit menuntut politik luar negeri Indonesia untuk memiliki kemampuan adaptif, antisipatif dan efektif (Wuryandari, 2008: 4).

Hubungan antar-bangsa secara bilateral dengan berbagai macam motif hubungannya tidak akan lepas dari kondisi lingkungan tempat berlangsungnya hubungan internasional, serta adanya pengaruh kekuasaan yang dimiliki untuk mencapai tujuan kepentingan nasional. Menurut Budiono (1987: 95) hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerja sama diantara dua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun yang jauh dari sebrang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan kerjasama politik, kebudayaan dan struktur ekonomi. Dalam hubungan antar bangsa tidak terlepas dari politik luar negeri, menurut K. J. Holsti mengemukakan bahwa:

“Politik luar negeri suatu negara merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional, juga dapat menjembatani batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. Politik luar negeri bisa berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, dan mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek” (Eby, 2011: 13).

Aksi, strategi, dan keputusan yang ditunjukkan kepada aktor-aktor di luar batas sistem politik domestik yakni negara. Sasaran utama kebijakan adalah hal-hal eksternal, dan ini yang membedakan kebijakan luar negeri dengan kebijakan dalam negeri. Breuning memandang perbedaan politik luar negeri dengan kebijakan luar negeri mengemukakan bahwa:

‘Kebijakan luar negeri adalah totalitas kebijakan suatu negara yang ditunjukkan kepada lingkungan di luar perbatasannya dan pada interaksinya. Kebijakan luar negeri suatu negara mencakup berbagai macam isu, mulai dari keamanan dan ekonomi, isu lingkungan dan energi, bantuan luar negeri, migrasi, hingga ke hak asasi manusia’ (Baris, 2013: 554).

Adanya saling ketergantungan antar negara dan keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi suatu hubungan, hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas dan sehingga adanya integrasi di dalamnya baik dalam segi ekonomi, politik dan pertahanan. Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda, namun kebanyakan interaksi kerjasama terjadi secara langsung diantara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama (Holsti, 1983: 209).

Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung. Pertahanan militer sebagai kekuatan bersenjata ditampilkan melalui sumber daya manusia dan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang dibangun serta dikembangkan secara profesional. Morgenthau memandang pertahanan militer sebagai dikemukakannya bahwa:

“Negara bangsa adalah aktor utama di panggung dunia, bahwa negara bangsa adalah aktor rasional yang mengambil keputusan rasional, dan bahwa negara selalu mencari kekuatan dan kemampuan untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan nasionalnya” (King, 2013: 596).

Negara-negara di dalam sistem internasional memiliki level kekuatan bervariasi, karena itu negara yang kuat dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara yang lemah. Maka negara-negara yang lebih lemah itu merasa perlu memperbesar kemampuan militernya. Demikian halnya dengan Indonesia yang Mengubah preferensi kebijakan pertahanannya dengan beralih kepada Rusia dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan militernya, setelah sekian lama bergantung kepada Amerika Serikat. Hubungan diplomatik Indonesia dengan

Rusia telah berlangsung selama 57 tahun walaupun mengalami pasang surut. Awal hubungan ditandai oleh kedatangan Menteri Luar Negeri Uni Soviet untuk menyampaikan pengakuan Uni Soviet kepada Republik Indonesia sebagai suatu negara, atas pengakuan dari Uni Soviet tersebut presiden Soekarno pun melakukan kunjungan ke negara tersebut pada tahun 1956. Dalam kunjungan ke Moskow Soekarno telah melakukan langkah perundingan untuk pertama kalinya pada bulan Agustus 1956 dalam perihal kerjasama dalam bidang militer.

Jika pada pertengahan bulan Mei 1958, pemerintah Amerika Serikat telah bersikap lunak terhadap mitra imbangnya, Indonesia dengan membuat ketentuan bagi penyediaan senjata ringan bagi batalion infantri dan suku cadang pesawat udara, maka arus pengiriman peralatan berat secara bertahap berdatangan dari Uni Soviet seperti 60 pesawat pemburu jet dan 20 pesawat pembom, serta 2 kapal perusak, 2 kapal selam dan kapal torpedo. Kedatangan alat berat dari Uni Soviet hal tersebut mempunyai relevansi langsung terhadap kampanye militer Republik Indonesia untuk mendapatkan kembali Irian Barat. Arus pengiriman perlengkapan militer berat meningkat sesuai dengan makin hangatnya hubungan Republik Indonesia dengan Moskow. Dalam hubungan kerjasama Indonesia dengan Rusia dalam bidang pertahanan militer yang pernah menjadi jembatan emas kedua bangsa, akan tetapi hubungan Indonesia dengan Rusia ini mulai menyusut pada pertengahan tahun 1960-an, dimana pada tahun 1965 terjadi tragedi politik di Indonesia dengan pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Uni Soviet yang memiliki keterhubungan dengan PKI merasakan akibatnya secara langsung karena setelah berkuasanya pemerintahan Orde Baru hubungan kedua belah pihak mulai membeku (Leifer, 1989: 91).

Setelah kejatuhan Uni Soviet dan berakhirnya masa perang dingin mempengaruhi perubahan peta politik internasional dan mempengaruhi posisi Uni Soviet dalam politik internasional. Rusia mulai bangkit sebagai penerus Uni Soviet di bawah pimpinan Mikhail Gorbachev. Kejadian tahun 1980-an menandai berakhirnya keseimbangan kekuatan bipolar antara Amerika Serikat dan Uni

Soviet yang telah mendominasi hubungan internasional sepanjang setengah abad. Walt memandang bahwa sistem unipolar sebagai dikemukakannya bahwa:

“Sistem ini menimbulkan konsekuensi yang harus dihadapi oleh aktor-aktor internasional, termasuk pilihan aliansi yang berubah secara signifikan dan strategi tawar-menawar. Tidak ada konsensus tentang apakah periode keseimbangan unipolar ini akan berbahaya atau bermanfaat dalam jangka panjang” (King, 2013: 603).

Sistem unipolar muncul dari ambruknya blok soviet dan berakhirnya perang dingin. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ada satu kekuatan besar yang di pegang oleh suatu negara yakni Amerika Serikat dengan kepentingan global dan jangkauan yang luas (King, 2013: 603). Amerika Serikat mempunyai peranan di daerah Kawasan Asia Pasifik, peranan besarnya kekuatan militernya berada di wilayah maritim. Keterhubungan permasalahan keamanan yang terjadi di kawasan regional menjadi pemicu peningkatan kekuatan militer di kawasan Asia Pasifik, terjadi kekosongan kekuatan dimana Amerika Serikat pasca perang Vietnam, pasukannya meninggalkan sekitar 20 persen kekuatan yang berada di kawasan dengan menutup pangkalannya yang berada di Philipina. Kekosongan kekuatan yang menjadi pemicu bagi negara-negara yang berpengaruh di kawasan yakni Jepang, Korea Utara dan Cina sebagai aktor yang berpengaruh di kawasan yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan kekuatan Amerika Serikat. Pemicu pertama kali adalah remilitarisasi kekuatan maritim Jepang, lalu disusul Cina melakukan peningkatan kekuatan militernya akibat dari peningkatan kekuatan Jepang dan Korea Utara. Pemicu tersebut berdampak juga bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik karena ketidak seimbangannya kekuatan, khususnya Indonesia untuk melakukan peningkatan kekuatan dikarenakan adanya dilema keamanan disana. Beberapa dekade setelah pasca Perang Dingin yang menjadi aktor yang paling dominan di wilayah kawasan Asia Pasifik adalah Cina ditambah kepentingan nasionalnya menginginkan memperluas wilayah perairan dengan meningkatkan kekuatan militer maritimnya (Agussalim, 1999: 22).

Bila dilihat dari permasalahan di atas, Indonesia dalam kerjasama dalam bidang pertahanan sempat berpaling ke Amerika Serikat selama Orde Baru sebagai negara penyedia Alat utama sistem persenjataan (Alutsista) militer. Tapi kemudian Indonesia menelan pil pahit akibat embargo suku cadang persenjataan dari sang produsen dikarenakan penilaian sepihak mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (Lebang, 2010 :100). Pada tahun 1996 Amerika Serikat menerapkan kebijakan embargo kepada Indonesia atas pelanggaran HAM yang dilakukan di Dili Timor-Timur pada tahun 1992, dimana Tentara Nasional Indonesia dituduh telah melakukan pembantaian terhadap warga Timor-Timur yang pro kemerdekaan, dan Dunia Internasional menyebutnya dengan *Dilli Massacre*. Sebagian negara-negara Barat menganggaap bahwa keperluan untuk menjamin penghormatan akan hak-hak asasi manusia kalau perlu ditegakkan dengan cara-cara pemaksaan terhadap negara-negara yang dianggap melanggar HAM sekalipun hal itu akan mengorbankan prinsip-prinsip hidup bertetangga baik dengan negara tetangganya. Dalam taraf yang lebih lanjut, apabila dalam sebuah negara terjadi pelanggaran HAM serius, maka intervensi oleh negara atau badan-badan internasional dibenarkan (Ambarwati *et al*, 2012: 65).

Perubahan pandangan negara-negara Barat terhadap perubahan di arena politik internasional, baik dalam hal kompleksitas permasalahan dan pelaku hubungan internasional, memungkinkan munculnya isu-isu baru sebagai agenda internasional seperti HAM, lingkungan, kejahatan lintas nasional dan demokrasi semakin mendapatkan perhatian besar bagi masyarakat internasional dan dianggap sebagai isu penting pada masa itu (Pudjiastuti, 2008: 122). Akibat embargo tersebut kondisi Indonesia khususnya di bidang pertahanan mengalami kemerosotan karena kesulitan mendapatkan suku cadang dan perawatan akibat tidak adanya lagi pasokan Alutsista dari Amerika Serikat yang sebelumnya menjadi pemasok utama Alutsista Indonesia (Lebang, 2010: 100).

Keadaan pertahanan militer Indonesia yang sedang labil tersebut karena tidak adanya pasokan Alusista lagi membuat pemerintah Indonesia menjadi cemas bisa saja wilayah teritorialnya terancam oleh pihak asing, dalam rangka menjaga keamanan melalui kekuatan dan akumulasi senjata, Indonesia mungkin menghadapi ketidakamanan yang lebih besar. Hal ini yang disebut dengan dilema keamanan, oleh penganut realis yang ditransformasikan ke lingkungan internasional anarkis yang mendorong semua negara untuk menjaga dirinya sendiri. Kondisi anarkis merupakan kondisi tidak terdapat otoritas yang lebih tinggi di atas negara. Jervis menjelaskan mengenai dilema keamanan dikemukakannya bahwa:

“Dilema keamanan adalah adanya problema bahwa didalam sistem internasional yang anarkis, setiap langkah atau tindakan suatu negara untuk membangun kemampuan pertahanannya akan mengurangi keamanan negara lain. Alasan dari ketidakamanan ini adalah setiap peningkatan kemampuan militer dari suatu negara akan menyebabkan negara di sekelilingnya merasa kurang aman” (Cox, 2013: 620).

Pada gilirannya, negara-negara akan meningkatkan kemampuannya, yang mengurangi keamanan negara yang lebih dahulu meningkatkan kemampuannya, dan negara itu akan meningkatkan lagi kemampuannya. Siklus ini menjelaskan bahwa masing-masing negara yang sebenarnya murni ingin memperkuat pertahanannya pada akhirnya akan masuk dalam perlombaan senjata dan, jika suatu negara merasa harus menggunakan senjatanya karena tidak bisa meningkatkan lagi kemampuannya, akan masuk kedalam potensi konflik (Cox, 2013: 621).

Dimata negara-negara Asia Tenggara, Indonesia disebut sebagai bangsa yang besar. Besar karena luas wilayah darat dan perairannya, besar juga karena jumlah penduduknya. Jumlah Alutsista untuk melakukan pengamanan, tidak sebanding dengan luas wilayah NKRI untuk menghadapi situasi dan perkembangan dan ancaman maupun bentuk perang yang tidak lagi konvensional, penguasaan atas teknologi bagi TNI merupakan suatu keharusan. Tetapi kondisi

ROBBY ILMA FERMANA, 2016

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-RUSIA DI BIDANG MILITER

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

rill Alutsista TNI masih sangat memprihatinkan, karena sebagian besar Alutsista mereka adalah warisan peralatan tahun 1960-1980-an.

Pada masa pemerintahan Megawati hubungan antar kedua bangsa ini mulai harmonis kembali, pada tanggal 19 Oktober 2001 Megawati dan Vladimir Putin sempat mengadakan pertemuan pada saat dilaksanakannya KTT APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) di Shanghai China mereka membahas mengenai isu terorisme yang berada di Indonesia. Selain itu, pada tanggal 27 September 2002 Menlu Indonesia Hasan Wirajuda melakukan kunjungan resmi ke Rusia dan disambut dengan hangat oleh Menlu Rusia Igor Ivanov. Kedatangan Menlu Indonesia merupakan momentum yang baru bagi kedua negara untuk memasuki tahapan hubungan dan kerjasama lebih tinggi. Dalam pertemuan bilateral itu juga dilakukan penandatanganan Memorandum Konsultasi Bilateral antara Kementerian Luar Negeri yang menyepakati bahwa suatu ketika akan meningkat menjadi Konsultasi Bilateral Antar Pemerintah. Bersamaan dengan kunjungan Menlu Indonesia tersebut, kedua negara untuk pertama kalinya mengadakan Sidang Komisi Bersama dalam format baru guna mendorong peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan, serta iptek.

Megawati melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia tanggal 20-23 April 2003 dan menghasilkan deklarasi kerangka kerja hubungan persahabatan dan kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia pada abad ke-21. Deklarasi tersebut membahas sejumlah kesepakatan seperti kerjasama teknik militer, perbankan, dan teknologi ruang angkasa. Pada saat bersamaan, kedua pihak sedang mempersiapkan berbagai persetujuan bilateral di bidang penggunaan nuklir untuk maksud damai, perikanan, pariwisata, usaha kecil dan menengah (UKM), kesehatan, olah raga, dan pendidikan, munculnya kebutuhan untuk memodernisasi peralatan militer untuk memperkuat sistem pertahanan nasional. Sayangnya, pada saat itu Indonesia masih menjalani embargo senjata dari Amerika Serikat, sehingga ketika muncul kebutuhan untuk memodernisasi peralatan militer, tidak bisa mengharapkan kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal ini memacu Megawati untuk melakukan langkah taktis dengan melakukan

kunjungan ke Rusia dan sejumlah negara Eropa Timur untuk keluar dari belitan embargo senjata ini. Kunjungan kenegaraan ini mendapatkan respon positif dari Rusia. Megawati melakukan pembelian dua pesawat *Sukhoi Su-27SK*, dua pesawat tempur *Sukhoi Su-30MK*, dan dua helikopter tempur MI-35 dengan sistem imbal dagang. Komoditas untuk imbal dagang tersebut antara lain produk minyak kelapa sawit mentah dan karet, dengan total imbal dagang kurang lebih AS \$ 175 juta.

Indonesia Mengubah orientasi militernya dengan menjalin kerjasama pertahanan dengan Rusia yang dikenal memiliki keunggulan dibidang militer, bahkan disebut mewarisi kekuatan militer Uni Soviet dan kerap kali melakukan perlombaan senjata dengan Amerika Serikat. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Rusia pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai ketika dengan dibentuknya Komisi Kerjasama Teknik Militer (KKTM) yang ditandatangani dalam sidang komisi pertama di Rusia pada tanggal 22 September 2005. Indonesia secara perlahan-lahan mampu menunjukkan kemajuan dibidang pertahanan dan tidak lagi tergantung dengan pasokan senjata dari Amerika dan Negara barat lainnya hal ini dikarenakan Rusia melakukan *Joint Production* dan alih teknologi dengan Indonesia tanpa didasari syarat Politik apapun. Pada tahun 2005 Amerika Serikat mencabut kebijakan embargo yang diterapkan pada Indonesia. Namun kebijakan tersebut hanya terbatas pada jenis Alutsista tertentu karena Indonesia masih di bebani syarat politik dalam penerapan HAM.

Gambaran diatas merupakan alasan Indonesia Mengubah orientasi hubungan bilateral dalam bidang pertahanan militer yang beralih ke Rusia kembali dimana semenjak masa orde baru Indonesia melakukan kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan militer sepenuhnya kepada Amerika Serikat akan tetapi dengan adanya embargo persenjataan dari Amerika Serikat membuat pertahanan Indonesia menjadi labil, dan dapat mengancam kestabilan pertahanan Indonesia baik eksternal maupun di internalnya sendiri. Dari situlah untuk menjaga stabilitas keamanan memerlukan modernisasi Alutsista yang baru

dengan di embargo oleh Amerika Serikat maka Indonesia melakukan hubungan kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan dengan Rusia.

Berangkat dari latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut secara lebih mendalam. Peneliti mempunyai beberapa pandangan, yang pertama pada masa pemerintahan Megawati adanya keinginan untuk menetralkan kembali hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia dalam bidang militer karena pada masa Orba kerjasama dalam bidang militer lebih condong ke negara Amerika Serikat, kedua Megawati merupakan putri kandung dari Soekarno dimana megawati menginginkan hubungan Indonesia dengan Rusia berjalan dengan mesra seperti apa yang dilakukan Soekarno pada masanya, ketiga adanya embargo dari Amerika Serikat membuat pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap yakni melakukan hubungan bilateral dalam bidang pertahanan kembali ke Rusia untuk menjaga stabilitas pertahanannya, merupakan fokus kajian peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengajukan proposal penelitian skripsi dengan judul “Hubungan Bilateral Indonesia-Rusia di Bidang Militer: Sebuah Pembahasan Dalam Perspektif Global (2004-2014)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah utama yang akan dikaji yaitu “Mengapa Indonesia memilih Rusia sebagai mitra kerjasama dalam bidang militer periode 2004-2014?”. Untuk memfokuskan kajian penelitian, penulis membuat tiga pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana dinamika perjalanan hubungan bilateral Indonesia-Rusia dalam bidang militer periode 2004-2014?
2. Bagaimana realisasi hubungan bilateral Indonesia-Rusia dalam bidang militer periode 2004-2014?

3. Bagaimana kendala yang dihadapi Indonesia-Rusia dalam hubungan bilateral dalam bidang militer pada periode 2004-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok pemikiran di atas, untuk menjawab dan memecahkan rumusan masalah penelitian merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh penulis. Selain itu, ada beberapa tujuan penelitian yang penulis tetapkan diantaranya:

1. Mendeskripsikan dinamika perjalanan hubungan bilateral Indonesia-Rusia dalam bidang militer pada periode 2004-2013, meliputi, hubungan kerjasama militer Indonesia-Rusia di pemerintahan orde baru, hubungan kerjasama militer Indonesia-Rusia pasca orde baru sampai tahun 2013.
2. Mendeskripsikan realisasi hubungan bilateral Indonesia-Rusia dalam bidang militer pada periode 2004-2013, meliputi kesepakatan-kesepakatan yang disetujui antara kedua belah pihak, upaya pemerintah Indonesia memodernisasi Industri pertahanan dalam negeri sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat.
3. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Rusia di bidang militer pada periode 2004-2013, meliputi sikap Amerika Serikat terhadap hubungan bilateral Indonesia-Rusia dalam bidang militer pada periode 2004-2013, hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang militer.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa didapatkan dalam penelitian skripsi ini antara lainnya:

1. Bagi peneliti, dapat menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bentuk dari aplikasi teori yang didapat selama mengikuti proses perkuliahan di Jurusan Pendidikan Sejarah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang hubungan bilateral Indonesia-Rusia dalam bidang militer pada periode 2004-2013 bagi mahasiswa/mahasiswi Jurusan Pendidikan Sejarah, khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi karya tulis yang baik, serta dapat memberikan sumbangan terhadap perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah, perpustakaan Fakultas dan perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian mengenai hubungan bilateral Indonesia-Rusia dalam bidang pertahanan sebagai sejarah perjalanan bangsa.
5. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pengembangan materi dalam SK/KD bagi guru-guru mata pelajaran di tingkat sekolah, terutama ditingkat SMA kelas XII IPS Semester 2.

1.5 Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur, proses atau teknik yang sistematis dalam suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti (Sjamsuddin, 2007: 13). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *historis* atau metode sejarah. Menurut Ismaun (2005: 35) metode sejarah ialah rekonstruksi imajinatif tentang gambaran masa lampau peristiwa-peristiwa sejarah secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah. Menggambarkan permasalahan atau pertanyaan untuk diselidiki; mencari sumber tentang fakta historis; meringkas dan mengevaluasi sumber-sumber historis dan menyajikan fakta-fakta yang bersangkutan dalam suatu kerangka interpretatif Edson (Supardan, 2008: 306).

Adapun tahapan-tahapan tersebut diwujudkan dalam sebuah prosedur penelitian sejarah, seperti yang dikemukakan oleh Louis Gottschalk (1986: 32) terdiri dari 4 (empat) langkah kegiatan yang saling berurutan sehingga yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Keempat langkah tersebut yaitu heuristik (pencarian atau penemuan sumber), kritik sumber (kritik internal maupun kritik eksternal), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penyajian dalam bentuk laporan sejarah).

1. Heuristik (pencarian atau penemuan sumber). Heuristik merupakan kegiatan untuk mencari atau menghimpun data dan sumber-sumber sejarah atau bahan untuk bukti sejarah seperti dokumen, naskah, arsip, surat kabar, maupun buku-buku referensi lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam mengumpulkan sumber data dan informasi yang relevan dengan penelitian ini, peneliti melakukan teknik studi literatur atau studi kepustakaan. Dalam studi literatur peneliti mengumpulkan sumber-sumber berupa buku, koran, majalah, dan artikel-artikel yang relevan dengan permasalahan yang di kaji. Sumber-sumber yang telah terkumpul selanjutnya peneliti kaji dan pelajari sesuai dengan langkah-langkah dalam penelitian sejarah seperti yang telah diuraikan diatas.
2. Kritik Sumber. kritik sumber adalah tahap penilaian atau pengujian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dilihat dari sudut pandang nilai kebenarannya. Kebenaran dari sumber-sumber sejarah ini dapat diteliti secara otentisitas maupun kredibilitasnya, sehingga benar-benar dapat teruji keasliannya. Dalam kritik sumber ini peneliti melakukan 2 (dua) cara yaitu kritik ekstern dan intern.
 - a. Kritik Eksternal, yaitu cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah (Sjamsuddin, 2007: 132). Seperti untuk menentukan keaslian dan keotentikan suatu sumber sejarah. Misalnya : kapan dan di mana serta dari bahan apa

- sumber tersebut ditulis, sumber utamanya merupakan sumber-sumber sejarah yang sejaman.
- b. Kritik Internal, kritik internal dilakukan terutama untuk menentukan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya atau tidak. Kritik internal ini dilakukan setelah penulis selesai melakukan kritik eksternal, yaitu untuk melakukan pembuktian apakah sumber-sumber tersebut benar-benar merupakan fakta historis.
3. Interpretasi, langkah selanjutnya adalah interpretasi yaitu proses menyusun, merangkaikan antara satu fakta sejarah dengan fakta sejarah yang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dimengerti dan bermakna. Tujuannya agar data yang ada mampu untuk mengungkap permasalahan yang ada sehingga diperoleh pemecahannya. Dalam proses interpretasi tidak semua fakta dapat dimasukkan tetapi harus dipilih fakta mana yang relevan dan sesuai dengan gambaran cerita yang hendak disusun.
 4. Historiografi, merupakan langkah terakhir dari metode sejarah yang penulis lakukan. Tahap ini merupakan langkah penulisan sejarah yang disusun secara logis, menurut urutan kronologis dan tema yang jelas serta mudah dimengerti yang dilengkapi dengan pengaturan bab atau bagian-bagian yang dapat membangun urutan kronologis dan tematis.

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Hasil yang diperoleh melalui studi literatur dikumpulkan dan kemudian disusun kedalam sebuah laporan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka sebagai alat analisis penelitian, metode dan teknik penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang berbagai pendapat bersumber pada literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji mengenai hubungan bilateral Indonesia-Rusia dalam bidang militer.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini diuraikan tentang metode dan teknik penelitian yang digunakan penulis selama proses penelitian, terutama dalam mencari sumber-sumber yang relevan dengan pokok kajian yang diangkat serta cara pengolahan sumber yang telah dikumpulkan. Metode penelitian ini menggunakan metode historis dengan teknik studi literatur dan studi dokumentasi.

Bab IV Pembahasan, Indonesia Memilih Rusia Sebagai Rekan Kerjasama dalam Bidang Militer Pada periode 2004-2014, dalam bab ini penulis membaginya menjadi lima bahasan utama. Pertama, mendeskripsikan sejarah hubungan bilateral Indonesia dan Rusia. Kedua, mendeskripsikan pentingnya pengembangan kekuatan militer bagi wilayah Indonesia. Ketiga mendeskripsikan dinamika perjalanan hubungan bilateral Indonesia-Rusia dalam bidang militer pada periode 2004-2014. Keempat mendeskripsikan realisasi hubungan bilateral Indonesia-Rusia dalam bidang militer pada 2004-2014. Kelima, kendala yang dihadapi Indonesia-Rusia dalam hubungan bilateral dalam bidang militer pada periode 2004-2014.

Bab V Kesimpulan, bab ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan selama penelitian. Saran dan rekomendasi peneliti tujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.